

## Urgensi Pengelolaan Sumber Dana Pendidikan dan Penggunaannya Sebagai Investasi SDM Berkelanjutan

Dicky Artanto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

---

### Keywords:

Financial Management, Education  
Financing, Budgeting

---

### \*Correspondence Address:

[21204091012@student.in-suka.ac.id](mailto:21204091012@student.in-suka.ac.id)

**Abstract:** *The 12-year compulsory education policy, which was established starting in 2012, makes the education aspect a major concern for the community. This is evidenced by the state budget of 20% for the purposes of supporting the advancement of education. The amount of the budget requires appropriate management to improve the quality of education. This research explores the study of theories and results in the field on how to explore sources of education funding and how schools manage educational funding sources. This research is a descriptive qualifier to analyze the management of sources and the use of education financing at SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Data analysis was carried out interactively using the Miles and Huberman method which includes data collection, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results showed that the principal of SMP Muhammadiyah 1 Prambanan as the holder of authority, was very careful in extracting the main budget source from the parents. This prudence is evidenced by the determination of the budget by considering the aspirations of subordinates before it is decided to be the main reference for the implementation of the program for one school year. In managing education funds, school principals pay attention to aspects of regulations and rules set by the Muhammadiyah association, especially by government laws.*

---

## PENDAHULUAN

Wajib belajar 12 tahun yang digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2012 menjadikan aspek pendidikan menjadi urusan penting dan tanggung jawab yang fundamental bagi negara. Tanggung jawab itu dapat diwujudkan berupa pemeberian alokasi anggaran pada aspek tersebut melau APBN.(Mustofa, 2017) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadikan semua unsur bergerak untuk mengutamakan aspek pendidikan tersebut, terlebih dengan adanya anggapan bahwa pendidikan

sebagai investasi masa depan sehingga masyarakat semakin yakin bahwa untuk mengubah taraf kesejahteraan hidup yakni melalui pendidikan.(Moh & Imron, 2016) Pemerintah dalam memajukan pendidikan pada akhirnya memberikan alokasi anggaran yang cukup besar dari APBN, dan memberikan hak bagi daerah yang sering dikenal dengan otonomi daerah sehingga pengelolaan pendidikan dapat merata.(Barlian, 2016) Dengan sistem ini sehingga pemerataan kebutuhan akan pendidikan dapat diketahui dan merata pada setiap daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Rasyid, 2015)

Pendidikan dipandang sebagai hal yang fundamental dalam memajukan dan membuat sebuah bangsa menjadi lebih modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. (Waliyah et al., 2021) Dalam hal ini pendidikan pun dianggap merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup sebuah bangsa. Pada awalnya pendidikan masih jarang mendapatkan perhatian dari para ahli ekonomi, karena a) peranan pendidikan dalam ekonomi nasional dinilai relatif kecil, b) adanya pola pikir yang memandang kemakmuran merupakan sesuatu yang bersifat material dan fisik, dan c) hasil dari riset ekonomi diperoleh bahwa pendidikan merupakan sektor yang paling banyak mengeluarkan biaya pajak yang cukup besar dari pemerintah. (Abidin, 2017)

Memahami bahwa peranan pendidikan dalam pengeluaran pajak dari pemerintah yang cukup besar, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan seberapa besar pula dampak pendidikan pada ekonomi. Perhatian itu ditunjukkan

diantaranya oleh seorang ahli ekonomi Adam Smith yang mengeluarkan pendapat bahwa kita merasa berhutang budi pada pendidikan, karena pendidikan membuat kita menjadi unggul dan intelligent, panjang akal dan memiliki kebiasaan yang baik. Namun, masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai pendapat Adam Smith ini, salah satunya ialah orang merasa bahwa pengaruh pendidikan pada ekonomi datangnya kemudian, tidak langsung pada saat itu bisa dirasakan. (Ferdi, 2013) Dari pernyataan ini maka dapat dipahami pendidikan menjadi sebuah investasi masa depan yang dapat memberikan dampak lebih baik.

Berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, hal yang sangat mendasar ialah orientasi pengelolaan tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan akan dapat berkompetisi dengan sehat apabila memiliki mutu yang terbaik. Mutu tersebut dapat dibangun melalui penggunaan sumber dana yang memadai dan pengelolaan dana yang tepat guna. (Ulpha Lisni Azhari, 2016) Berdasarkan pada pendahuluan ini maka fokus penelitian akan mengupas terkait urgensi pengelolaan sumber dan penggunaan biaya pendidikan kaitannya dengan dampaknya pada kualitas peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada realitas sosial dan objeknya secara mendalam, seperti yang peneliti gunakan untuk mengkaji urgensi pengelolaan sumber dan penggunaan biaya pendidikan sebagai

investasi masa depan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.

Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk menjamin validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yakni penggunaan sumber yang berbeda untuk menggali data yang sejenis dengan teknik pengumpulan data yang sama. Adapun sumber penelitian ini ialah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Siswa. Triangulasi metode yakni penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik deksripsi analisis kualitatif, yakni peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh dan kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat – kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. (Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1992)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendanaan Pendidikan**

Urgensi pembiayaan pendidikan tidak hanya untuk sekedar kesejahteraan guru saja, melainkan juga untuk penunjang sarana dan prasarana pendidikan, kebutuhan guru, kebutuhan siswa, kebutuhan kantor pendidikan, dan tenaga

ahli pendidikan, guna untuk mencapai kualitas pendidikan yang terbaik. (Durotun Nafisah, Widiyanto, 2017) Pemerintah tidak hanya sekedar sebagai pengontrol jalannya pendidikan di seluruh pelosok tetapi sebagai sumber dana pendidikan yang utama dari berbagai bentuk lembaga pendidikan.

Pendidikan merupakan sumber utama dalam pembangunan SDM Unggul bagi suatu bangsa, nampaknya pemerintah perlu untuk membuat skema yang lebih baik dalam pengalokasian pendanaan pendidikan, namun tidak sekedar memebrikan skema tetapi sekaligus mengawasi realisasi anggaran yang digulirkan. (Luh & Supartini, 2012) Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan pendanaan pendidikan diperoleh dari pemerintah berupa dana untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana, sedangkan dana operasional diperoleh dari wali murid melalui biaya SPP, daftar ulang, infaq, dan support dari lembaga zakat, serta dari dana amal usaha yang dikembangkan oleh sekolah. (Wawancara Ibu Daswati Rofiatun Sahifah Kepala SMP Muh 1 Prambanan, 2 November 2022). Dari perolehan anggaran yang dikelola inilah terdapat perbedaan yang nyata antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Lembaga pendidikan swasta harus memiliki strategi lebih agar memperoleh anggaran untuk peningkatan kualitas.

Data mengenai pembiayaan pendidikan dapat dipaparkan dalam tiga hal yakni pertama, keseluruhan biaya pendidikan di Indonesia yang terdiri atas : a) dana pemerintah di luar anggaran pemerintah pusat, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, b) pembayaran atau kontribusi dari siswa/keluarga, c) sumber-sumber pembiayaan lain yang

tidak selalu disediakan oleh sekolah seperti biaya transportasi, seragam, buku-buku penunjang, dan lain sebagainya. (Hery Nugroho, 2021) Kedua, biaya sistem pendidikan, yakni suatu kombinasi dana-dana pemerintah dan ketersediannya untuk memenuhi kontribusi bagi pengeluaran sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga siswa atau sumber-sumber lain. Ketiga, dana yang dibelanjakan untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji, barang-barang lain, dan berbagai pelayanan di SD, SLTP, dan SMA. (Hery Nugroho, 2021)

Perlunya pembiayaan pendidikan bagi lembaga pendidikan maka bagi sekolah – sekolah swasta tentu membutuhkan strategi ekstra agar dapat meyakinkan wali murid agar berkenan memberikan pembiayaan yang ditentukan oleh sekolah. Oleh karenanya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan maka disusun dalam RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), rancangan ini disusun dalam jangka waktu tahun anggaran selama dua semester atau satu tahun. Dengan disusunnya RAPBS tersebut maka wali murid akan dapat melihat secara transparan kebutuhan sekolah dalam menunjang kualitas pendidikan. (Wawancara Ibu Samsiyati Sudiatning, Bendahara SMP Muh 1 Prambanan, 2 Novemebr 2022).

### **B. Klasifikasi Dana Pendidikan**

Pendidikan memiliki nilai moneter baik langsung dan tidak langsung, sehingga dengan hal ini sekolah tidak dapat dibebaskan dari dana. (A. Rusdiana, 2019) Semua dana pendidikan yang digunakan oleh peserta didik untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah selama satu periode penganggaran disebut dengan total student education cost. (Mustofa, 2017) Menurut Thomas dalam artikel Sudarmono menyebutkan bahwa dana pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yakni :

- 1) Dana langsung dan tidak langsung, dana langsung yaitu dana yang digunakan untuk operasional sekolah dan pembangunan, serta dana rutin. Sedangkan dana tidak langsung merupakan dana yang menunjang peserta didik untuk dapat hadir di sekolah, yang mencakup biaya hidup, transportasi, dan dana lainnya. Dana tidak langsung ini tidak termasuk dana yang ditulis karena tidak ada catatan resmi, sehingga tidak termasuk dana yang dituliskan dalam perencanaan oleh administrator maupun pemangku kebijakan di sekolah.
- 2) Dana masyarakat dan dana pribadi, dana masyarakat merupakan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat secara langsung dan tidak langsung, baik berupa uang, sekolah, uang buku, maupun dana lainnya. Dana tidak langsung yang dikeluarkan masyarakat seperti pajak dan restribusi. Didalam *social cost* termasuk *private cost*, yaitu dana yang berasal dari rumah tangga termasuk kesempatan yang hilang. *Private cost* adalah dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap peserta didik. Sementara dana

tidak langsung merupakan *income forgone* setelah dikenai pajak.

- 3) *Monetary and Non Monetary Cost*, *Monetary cost* diartikan sebagai dana langsung dan tidak langsung yang dibayar oleh masyarakat dan individu, sedangkan non monetary cost ialah kesempatan yang hilang karena digunakan untuk membaca buku dan kegiatan belajar. (Sudarmono et al., 2021)

Berdasarkan dari paparan diatas, dan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan bahwa di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam penggalan sumber dana pendidikan diklasifikasi dalam beberapa hal, diantaranya : Dana yang diperoleh dari wali murid dimana dana ini digunakan untuk operasional dan penunjang pendidikan, dana yang diperoleh dari masyarakat salah satunya dari LazisMU dana ini digunakan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Dana dari masyarakat dalam satu tahun dapat menerima sebesar Rp. 328.000.000 yang dialokasikan untuk beasiswa bagi siswa. Serta yang terakhir yakni dana infaq harian dari siswa melalui program GERIMIS (Gerakan Infaq Minimal Seribu). Serta dana pemerintah yakni berubah bantuan untuk pembangunan fisik dan sarana prasarana. (Wawancara Ibu daswati Rofiatun Sahifah dan Ibu Samsiyati Sudiyatning, 2 Novemebr 2022).

Dari hasil pendanaan tersebut maka kegiatan pendidikan di SMP Muhamadiyah 1 Prambanan dapat tercover sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Anggaran – anggaran tersebut diperoleh karena adanya tawaran kualitas yang diberikan oleh lembaga. Tawaran

kualitas itu tercermin dalam program dan kegiatan sekolah, baik kegiatan inti, dan ekstrakurikuler yang menunjang pendidikan. (Hasil Observasi di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, 28 Oktober 2022).

### C. Pengelolaan Dana

Gaffar dalam artikel Achmad Anwar Abidin meyakini bahwa terdapat beberapa faktor dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yakni sistem manajemen pembiayaan harus diikuti oleh pengelolaan keuangan, pengelolaannya tergantung apakah sistem itu cukup efisien atau tidak. (Abidin, 2017) Pada sistem pemerintahan terpusat maka pengelolaan memiliki aturan yang sentralistik, sehingga hal ini tidak memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan untuk menentukan kebutuhan.

Pendidikan memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Agar investasi di bidang pendidikan mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kegiatan mengatur penerimaan, pengalokasian, dan mempertanggungjawabkan keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran merupakan manajemen keuangan. Tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu *financial planning, implementation, and evaluation*.

Jones dalam artikel Novrian Satria menjelaskan bahwa "*financial planning is called budgeting*", merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi akibat efek sampingan yang merugikan. Pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan

kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. *Evaluation* merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. (Perdana, 2019)

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran, (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan. Bertolak dari pengertian manajemen keuangan, tahapan (fungsi), dan komponen manajemen keuangan, maka proses manajemen keuangan perlu ada strategi pengelolaan. (Rasyid, 2015)

Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam pengelolaan dana pendidikan, dapat dipaparkan dalam beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Strategi sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan. Sekolah merupakan sebuah sistem, yang memiliki serangkaian komponen saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk mentransferkan serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan realitas dari ketergantungan sekolah terhadap lingkungan. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, selaras dengan perkembangan yang terjadinya pada lingkungan. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap transformasi dalam sistem sesuai dengan tuntutan keluaran. (Mustofa, 2017). Strategi pada dasarnya adalah cara pandang manusia yang sistematis, yang pada akhir – akhir ini telah dikembangkan menjadi sebuah landasan konseptual manajemen. (Durotun Nafisah, Widiyanto, 2017) Cara berpandang

manusia dapat diidentifikasi menjadi tiga hal yakni secara mekanik, intuisi, dan strategik. (Ferdin, 2013) Cara pandang inilah yang kemudian menjadi suatu hal yang dinamis dan kreatif sesuai dengan kondisi tertentu.

Diungkapkan bahwa karakteristik masalah strategi menyangkut orientasi ke masa depan, berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks, perhatian manajemen puncak, pengaruh jangka panjang, dan alokasi sumber-sumber daya. Sehubungan dengan pendapat tersebut, berpikir strategis berkenaan dengan banyak pilihan sebagai alternatif pemecahan masalah.

Pemecahan masalah, sangat memerlukan analisis yang cermat dan tepat untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masa depan. Ada tiga langkah strategis dalam manajemen, yakni : strategic planning sebagai dokumen formal, strategic management sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan, dan strategic thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil yang berkesinambungan. (Abidin, 2017)

Dalam kaitannya dengan strategi sekolah dalam menggali dana pendidikan, secara administratif strategi tersebut sangat tepat, karena berkaitan dengan bagaimana seorang pengelola sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya, jenis sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Strategi tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggara berbagai kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis internal dan eksternal sekolah berkenaan dengan potensi sumber-sumber dana yang ada.
- 2) Mengidentifikasi dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali.
- 3) Menetapkan sumber-sumber dana yang jelas dapat ditarik sebagai sumber perolehan seperti: a) Musyawarah dengan orangtua peserta didik baru, pada awal tahun ajaran. b) Musyawarah dengan dewan guru untuk mengembangkan koperasi sekolah. c) Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

Pengelolaan dana di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam hasil wawancara disebutkan bahwa dalam mengambil kebijakan tentu kepala sekolah beserta seluruh civitas akademika guru dan juga karyawan memetakan kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan dalam pembelajaran pada satu tahun mendatang. Dari situlah kepala sekolah mengumpulkan aspirasi masukkan dan diplenokan program – program yang sekiranya dapat dicover dengan anggaran yang dirancang. (Hasil Wawancara Ibu Samsiyati Sudiyatning, Bendahara SMP

Muh 1 Prambanan, 2 November 2022).

2. Perencanaan pengelolaan dana. Perencanaan dalam manajemen disebut juga dengan istilah *planning*, perencanaan di sekolah artinya *planning* terhadap segala bentuk perencanaan yang akan digulirkan oleh sekolah tersebut, baik dari segi perencanaan anggaran, program, maupun pembangunan. (A. Rusdiana, 2019) Perencanaan ini juga biasa disebut penganggaran (*budgeting*). Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan “*Budgeting brings fiscal resources demanded in planning and programming into sharper focus*”. (Perdana, 2019)

Perencanaan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dilakukan dengan menghimpun dari berbagai kebutuhan, kebutuhan dapat diketahui dari menginventarisir keperluan yang disampaikan dari bawah ke atas, yakni dari guru dan karyawan lalu naik ke wakil kepala sekolah dan akhirnya naik pada kepala sekolah untuk diputuskan. (Hasil Wawancara Ibu Samsiyati Sudiyatning, Bendahara SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, 2 November 2022).

Anggaran atau budget merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Pendekatan dalam menyusun anggaran pendidikan dalam dua pendekatan yang umum digunakan yaitu

pendekatan tradisional dan *Planning Programming Budgeting System*(PPBS). Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan tentang pendapatan dan pengeluaran. Prakiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga pendapatan itu dapat direalisasikan secara realistis.(Hery Nugroho, 2021)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana pendidikan tingkat sekolah, sejalan dengan napas desentralisasi. Ada tiga cara pandang terkait hal ini yaitu : 1) *Comparative Approach*; penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran untuk setiap tahun; 2) *The Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBES)*, penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Pendekatan ini analisis dana pelaksanaan, serta penilaian PPBES didasarkan atas zero-based budgeting; 3) *Functional Approach*: penganggaran dalam bentuk gabungan antara unsur PPBES dengan *Comparative Approach*.(Mustofa, 2017)

3. Prosedur penyusunan anggaran. Prosedur perencanaan anggaran pendidikan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan administrator dapat melaporkan secara sederhana pula. Perencanaan anggaran tersebut biasanya menggunakan format dari Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yaitu (1) Sumber pendapatan terdiri dari UYHD, DPP, OPF dan BP3, dan lain-lain; (2) Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan, dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut :

- 1) Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, antara lain mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan



dan pertanggung-jawaban keuangan.

- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, antara lain menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. (Sudarmono et al., 2021) Penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi anggaran dana pendidikan di sekolah antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar.
4. Penyusunan pendapatan dan pengeluaran belanja sekolah. Penyusunan pendapatan dan pengeluaran anggaran belanja sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan menganut pola paduan antara pengatur pemerintah pusat dan sekolah. Artinya, ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan demikian, pola pengelolaan anggaran belanja sekolah, terbatas pada mengelola pada tingkat operasional.

sekolah tidak mempunyai kebijakan pengelolaan secara operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat. Sselanjutnya, cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi daerah maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam pengelolaan dana untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah. (Ulpha Lisni Azhari, 2016)

Dalam pembuatan anggaran belanja sekolah yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Pembuatan anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Dari perspektif tersebut pembuatan anggaran belanja dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara bagi pencapaiannya.

Pengelolaan dana pendidikan tingkat sekolah dalam konteks otonomi daerah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para

wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta dewan sekolah di bawah pengawasan pemerintah. Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan kepala sekolah memiliki wewenang dalam penggalan anggaran sekaligus pelaksana anggaran. Anggaran yang diperoleh digunakan sesuai dengan RAPBS yang ditetapkan. (Hasil Wawancara Ibu Daswati Rofiatun Shaifah, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, 2 November 2022).

5. Prosedur pengaturan. Secara garis besar, pengaturan dana pendidikan disekolah meliputi penerimaan keuangan sekolah, penggunaan keuangan sekolah, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

- 1) Penerimaan keuangan sekolah. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dilakukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah, terutama berkaitan dengan penerimaan keuangan. Namun dalam penyelenggaraannya ada beberapa karakteristik yang identik.

Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan penganggaran (Depdiknas, 2000) sumber dana pendidikan

meliputi anggaran rutin (DIK); anggaran pembangunan (DIP); dana penunjang pendidikan (DPP); Dana BP3; donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Di samping itu, dapat pula digali sumber-sumber yang mungkin dari pihak masyarakat dalam bentuk saling menguntungkan. (Ni Luh Susilawati, Made Yudana, 2014)

- 2) Penggunaan keuangan sekolah. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan di sekolah.

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran sekolah dan pengeluaran atau

tidak. Ongkos dari sumber sekolah termasuk nilai setiap input yang digunakan, sekalipun sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat.

Dalam SKB Mendiknas dan Menkeu No.0585/K/1997 dan No.590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-9-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi: pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan EBTA/EBTANAS dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.

Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan, maka kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan di sekolahnya. Meskipun demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran. Berdasarkan pada pengamatan peneliti di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan selama ini Kepala Sekolah sangat berhati – hati dalam penggunaan anggaran. Hal itu terbukti dengan perincian yang ada pada setiap item kebutuhan

yang dikelompokkan dalam kebutuhan primer dan sekunder serta tersier. (Hasil observasi, di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, 28 Oktober 2022).

Kehati – hatian kepala sekolah juga dikonfirmasi oleh siswa yang berperan sebagai pengurus IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) mengatakan dalam wawancara “kegiatan siswa dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang bisa menunjang siswa dalam pengembangan diri” (Wawancara dengan Zibran Ketua IPM SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, 3 November 2022).

- 3) Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pertanggungjawaban atau evaluasi keuangan sekolah dilakukan terhadap apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Cormark, *“auditing is verification, auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.”* Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang

berhak secara proporsional. (Luh & Supartini, 2012)

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam transparansi anggaran, dilakukan pada setiap semester dan awal Tahun Ajaran Baru. Sebagaimana hal ini berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti bahwa setiap awal tahun dan setiap semester kepala sekolah melaporkan list kebutuhan dan pengeluaran sekolah. Hal ini di konfirmasi oleh bendahara sekolah dalam hasil wawancara “di sini tentu pelaporan dilakukan berkala, ada setiap semester dan tahun ajaran baru barengan dengan rapat penetapan RAPBS”.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan teori dan hasil diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa urgensi pengelolaan sumber dan penggunaan pembiayaan pendidikan sebagai investasi masa depan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan memperhatikan aspek tata kelola manajemen keuangan dan sesuai dengan aturan perundang – undangan. Kepala sekolah sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam menetapkan kebutuhan anggaran dan penggalan sumber anggaran sangat berhati – hati dengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh komponen. Penetapan anggaran digodog melalui rapat akhir tahun dan per semester yang di tuangkan pada RAPBS. RAPBS menjadi acuan pokok dalam pelaksanaan penganggaran di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.

## REFERENCES

A. Rusdiana. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Filosofi,

Konsep, dan Aplikasi. *Pusat Penelitian Penerbitan UIN SGD Bandung*, 1(2).

Abidin, A. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjamin Mutu*, 1(2), 87–99.

Barlian, U. C. (2016). Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan Tingkat Sekolah Dalam Konteks Otonomi Daerah. *An - Nidzam*, 03(02), 69–86.

Durotun Nafisah, Widiyanto, W. S. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah. *Economic Educational Analysis Journal*, 6(3), 788–797.

Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.

Hery Nugroho, N. R. S. (2021). Kontribusi Biaya Pendidikan dan Pengelolaan Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung. *Suluh Pendidikan*, 19(2), 228–240.

Luh, N. I., & Supartini, K. (2012). *Analisis Satuan Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011*. 3, 1–14.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J., Data, Q., & Methods, A. A. (2014). *Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3 ed. (United States of America: Sage Publications, Inc, 2014), 14*. 2014.

Moh, & Imron, J. (2016). Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Al - Ibrah*, 1(1).

Mustofa, I. (2017). Rasionalisasi Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada Pendidikan Keagamaan Islam Formal. *Intizam*, 1(1).

Ni Luh Susilawati, Made Yudana, N. N. (2014). Analisis Biaya Pendidikan Pada

SMP Cipta Dharma Denpasar Tahun Pelajaran 2012/2013. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2).

Perdana, N. S. (2019). Analisis Pembiayaan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 7(1), 61–70.

Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, IV(1), 565–581.

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.

Ulpha Lisni Azhari, D. A. K. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXIII(2).

Walayah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria*, 1(1), 77–98.